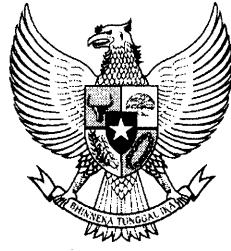


**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2015  
TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014  
KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 40 TAHUN 2015  
TANGGAL : 12 OKTOBER 2015**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014

KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:
  - a. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara.

## Pasal 2

Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada masa kerja golongan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan cara sebagai berikut:

- a. gaji pokok lama golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
- b. gaji pokok lama golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
- c. gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; atau
- d. gaji pokok lama golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (2) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar instansi induknya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.
- (3) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi induknya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima perbantuan; atau
  - b. apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan tidak berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

Pasal 4

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya paling rendah pejabat administrator.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 5

Keputusan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan kepada pejabat yang diberi delegasi dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan; dan
- b. Pejabat lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 6

Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
- b. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
- c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penyesuaian gaji pokok didasarkan atas masa kerja golongan sebelum dijatuhi hukuman disiplin:
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, penyesuaian gaji pokok berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. selama menjalani hukuman disiplin penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada tanggal 31 Desember 2014; dan
  - b. setelah selesai menjalani hukuman disiplin penyesuaian gaji pokok berdasarkan gaji pokok baru sesuai golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya.

- (3) Keputusan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 8

Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
- b. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
- c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani pemberhentian sementara atau sedang menerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi yang sedang menjalani pemberhentian sementara, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014; atau
- b. bagi penerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan pada saat yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak uang tunggu.

#### Pasal 10

Penyesuaian gaji pokok Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok baru dengan masa kerja golongan yang dimiliki Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan cara sebagai berikut:



- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang I/a dan golongan ruang I/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran II-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
- b. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran II-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; atau
- c. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran II-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 11

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan:

- a. Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; dan
- b. Salinan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2015

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1565

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN I-a  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 40 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
 NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30  
 TAHUN 2015

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015

GOLONGAN RUANG I/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG I/d

GOLONGAN RUANG I/a

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.402.400	1.486.500
2	1	1.402.400	1.486.500
3	2	1.446.500	1.533.400
4	3	1.446.500	1.533.400
5	4	1.492.100	1.581.700
6	5	1.492.100	1.581.700
7	6	1.539.100	1.631.500
8	7	1.539.100	1.631.500
9	8	1.587.600	1.682.900
10	9	1.587.600	1.682.900
11	10	1.637.600	1.735.900
12	11	1.637.600	1.735.900
13	12	1.689.200	1.790.500
14	13	1.689.200	1.790.500
15	14	1.742.400	1.846.900
16	15	1.742.400	1.846.900
17	16	1.797.200	1.905.100
18	17	1.797.200	1.905.100
19	18	1.853.800	1.965.100
20	19	1.853.800	1.965.100
21	20	1.912.200	2.027.000
22	21	1.912.200	2.027.000
23	22	1.972.400	2.090.800
24	23	1.972.400	2.090.800
25	24	2.034.600	2.156.700
26	25	2.034.600	2.156.700
27	26	2.098.600	2.224.600
28	27	2.098.600	2.224.600

GOLONGAN RUANG I/b


NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.531.500	1.623.400
5	4	1.531.500	1.623.400
6	5	1.579.700	1.674.500
7	6	1.579.700	1.674.500
8	7	1.629.500	1.727.300
9	8	1.629.500	1.727.300
10	9	1.680.800	1.781.700
11	10	1.680.800	1.781.700
12	11	1.733.700	1.837.800
13	12	1.733.700	1.837.800
14	13	1.788.300	1.895.700
15	14	1.788.300	1.895.700
16	15	1.844.700	1.955.400
17	16	1.844.700	1.955.400
18	17	1.902.700	2.016.900
19	18	1.902.700	2.016.900
20	19	1.962.700	2.080.500
21	20	1.962.700	2.080.500
22	21	2.024.500	2.146.000
23	22	2.024.500	2.146.000
24	23	2.088.300	2.213.600
25	24	2.088.300	2.213.600
26	25	2.154.000	2.283.300
27	26	2.154.000	2.283.300
28	27	2.221.900	2.355.200

GOLONGAN RUANG I/c

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.596.300	1.692.100
5	4	1.596.300	1.692.100
6	5	1.646.500	1.745.400
7	6	1.646.500	1.745.400
8	7	1.698.400	1.800.300
9	8	1.698.400	1.800.300
10	9	1.751.900	1.857.000
11	10	1.751.900	1.857.000
12	11	1.807.100	1.915.500
13	12	1.807.100	1.915.500
14	13	1.864.000	1.975.800
15	14	1.864.000	1.975.800
16	15	1.922.700	2.038.100
17	16	1.922.700	2.038.100
18	17	1.983.200	2.102.300
19	18	1.983.200	2.102.300
20	19	2.045.700	2.168.500
21	20	2.045.700	2.168.500
22	21	2.110.100	2.236.800
23	22	2.110.100	2.236.800
24	23	2.176.600	2.307.200
25	24	2.176.600	2.307.200
26	25	2.245.100	2.379.900
27	26	2.245.100	2.379.900
28	27	2.315.800	2.454.800

GOLONGAN RUANG I/d

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.663.800	1.763.600
5	4	1.663.800	1.763.600
6	5	1.716.200	1.819.200
7	6	1.716.200	1.819.200
8	7	1.770.200	1.876.500
9	8	1.770.200	1.876.500
10	9	1.826.000	1.935.600
11	10	1.826.000	1.935.600
12	11	1.883.500	1.996.500
13	12	1.883.500	1.996.500
14	13	1.942.800	2.059.400
15	14	1.942.800	2.059.400
16	15	2.004.000	2.124.300
17	16	2.004.000	2.124.300
18	17	2.067.100	2.191.200
19	18	2.067.100	2.191.200
20	19	2.132.200	2.260.200
21	20	2.132.200	2.260.200
22	21	2.199.400	2.331.400
23	22	2.199.400	2.331.400
24	23	2.268.700	2.404.800
25	24	2.268.700	2.404.800
26	25	2.340.100	2.480.500
27	26	2.340.100	2.480.500
28	27	2.413.800	2.558.700

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Pembinaan/Pefundang-undangan,  
  
Haryono Dwi Putranto

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN I-b  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 40 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
 NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30  
 TAHUN 2015

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015

GOLONGAN RUANG II/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG II/d

GOLONGAN RUANG II/a

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.816.900	1.926.000
2	1	1.845.600	1.956.300
3	2	1.845.600	1.956.300
4	3	1.903.700	2.017.900
5	4	1.903.700	2.017.900
6	5	1.963.600	2.081.500
7	6	1.963.600	2.081.500
8	7	2.025.500	2.147.000
9	8	2.025.500	2.147.000
10	9	2.089.300	2.214.700
11	10	2.089.300	2.214.700
12	11	2.155.100	2.284.400
13	12	2.155.100	2.284.400
14	13	2.223.000	2.356.400
15	14	2.223.000	2.356.400
16	15	2.293.000	2.430.600
17	16	2.293.000	2.430.600
18	17	2.365.200	2.507.100
19	18	2.365.200	2.507.100
20	19	2.439.700	2.586.100
21	20	2.439.700	2.586.100
22	21	2.516.500	2.667.500
23	22	2.516.500	2.667.500
24	23	2.595.800	2.751.600
25	24	2.595.800	2.751.600
26	25	2.677.500	2.838.200
27	26	2.677.500	2.838.200
28	27	2.761.900	2.927.600
29	28	2.761.900	2.927.600
30	29	2.848.800	3.019.800
31	30	2.848.800	3.019.800
32	31	2.938.600	3.114.900
33	32	2.938.600	3.114.900
34	33	3.031.100	3.213.000

GOLONGAN RUANG II/b

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.984.200	2.103.300
5	4	1.984.200	2.103.300
6	5	2.046.700	2.169.500
7	6	2.046.700	2.169.500
8	7	2.111.200	2.237.900
9	8	2.111.200	2.237.900
10	9	2.177.700	2.308.300
11	10	2.177.700	2.308.300
12	11	2.246.200	2.381.100
13	12	2.246.200	2.381.100
14	13	2.317.000	2.456.000
15	14	2.317.000	2.456.000
16	15	2.390.000	2.533.400
17	16	2.390.000	2.533.400
18	17	2.465.200	2.613.200
19	18	2.465.200	2.613.200
20	19	2.542.900	2.695.500
21	20	2.542.900	2.695.500
22	21	2.623.000	2.780.400
23	22	2.623.000	2.780.400
24	23	2.705.600	2.867.900
25	24	2.705.600	2.867.900
26	25	2.790.800	2.958.300
27	26	2.790.800	2.958.300
28	27	2.878.700	3.051.400
29	28	2.878.700	3.051.400
30	29	2.969.300	3.147.600
31	30	2.969.300	3.147.600
32	31	3.062.900	3.246.700
33	32	3.062.900	3.246.700
34	33	3.159.300	3.348.900




GOLONGAN RUANG II/c

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	2.068.100	2.192.300
5	4	2.068.100	2.192.300
6	5	2.133.300	2.261.300
7	6	2.133.300	2.261.300
8	7	2.200.500	2.332.500
9	8	2.200.500	2.332.500
10	9	2.269.800	2.406.000
11	10	2.269.800	2.406.000
12	11	2.341.300	2.481.800
13	12	2.341.300	2.481.800
14	13	2.415.000	2.559.900
15	14	2.415.000	2.559.900
16	15	2.491.100	2.640.600
17	16	2.491.100	2.640.600
18	17	2.569.500	2.723.700
19	18	2.569.500	2.723.700
20	19	2.650.400	2.809.500
21	20	2.650.400	2.809.500
22	21	2.733.900	2.898.000
23	22	2.733.900	2.898.000
24	23	2.820.000	2.989.300
25	24	2.820.000	2.989.300
26	25	2.908.800	3.083.400
27	26	2.908.800	3.083.400
28	27	3.000.400	3.180.500
29	28	3.000.400	3.180.500
30	29	3.094.900	3.280.700
31	30	3.094.900	3.280.700
32	31	3.192.400	3.384.000
33	32	3.192.400	3.384.000
34	33	3.293.000	3.490.600

GOLONGAN RUANG II/d

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	2.155.600	2.285.000
5	4	2.155.600	2.285.000
6	5	2.223.500	2.357.000
7	6	2.223.500	2.357.000
8	7	2.293.500	2.431.200
9	8	2.293.500	2.431.200
10	9	2.365.800	2.507.800
11	10	2.365.800	2.507.800
12	11	2.440.300	2.586.700
13	12	2.440.300	2.586.700
14	13	2.517.200	2.668.200
15	14	2.517.200	2.668.200
16	15	2.596.400	2.752.300
17	16	2.596.400	2.752.300
18	17	2.678.200	2.838.900
19	18	2.678.200	2.838.900
20	19	2.762.600	2.928.300
21	20	2.762.600	2.928.300
22	21	2.849.600	3.020.600
23	22	2.849.600	3.020.600
24	23	2.939.300	3.115.700
25	24	2.939.300	3.115.700
26	25	3.031.900	3.213.800
27	26	3.031.900	3.213.800
28	27	3.127.400	3.315.100
29	28	3.127.400	3.315.100
30	29	3.225.900	3.419.500
31	30	3.225.900	3.419.500
32	31	3.327.500	3.527.200
33	32	3.327.500	3.527.200
34	33	3.432.300	3.638.200

Sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Perencanaan Perundang-undangan,  
  
Haryono Dwi Putranto

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN I-c  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 40 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
 NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30  
 TAHUN 2015

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015

GOLONGAN RUANG III/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG III/d

GOLONGAN RUANG III/a

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.317.600	2.456.700
2	1	2.317.600	2.456.700
3	2	2.390.600	2.534.000
4	3	2.390.600	2.534.000
5	4	2.465.900	2.613.800
6	5	2.465.900	2.613.800
7	6	2.543.500	2.696.200
8	7	2.543.500	2.696.200
9	8	2.623.600	2.781.100
10	9	2.623.600	2.781.100
11	10	2.706.300	2.868.700
12	11	2.706.300	2.868.700
13	12	2.791.500	2.959.000
14	13	2.791.500	2.959.000
15	14	2.879.400	3.052.200
16	15	2.879.400	3.052.200
17	16	2.970.100	3.148.300
18	17	2.970.100	3.148.300
19	18	3.063.600	3.247.500
20	19	3.063.600	3.247.500
21	20	3.160.100	3.349.800
22	21	3.160.100	3.349.800
23	22	3.259.700	3.455.300
24	23	3.259.700	3.455.300
25	24	3.362.300	3.564.100
26	25	3.362.300	3.564.100
27	26	3.468.200	3.676.400
28	27	3.468.200	3.676.400
29	28	3.577.400	3.792.100
30	29	3.577.400	3.792.100
31	30	3.690.100	3.911.600
32	31	3.690.100	3.911.600
33	32	3.806.300	4.034.800

GOLONGAN RUANG III/b


NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.415.600	2.560.600
2	1	2.415.600	2.560.600
3	2	2.491.700	2.641.200
4	3	2.491.700	2.641.200
5	4	2.570.200	2.724.400
6	5	2.570.200	2.724.400
7	6	2.651.100	2.810.200
8	7	2.651.100	2.810.200
9	8	2.734.600	2.898.700
10	9	2.734.600	2.898.700
11	10	2.820.700	2.990.000
12	11	2.820.700	2.990.000
13	12	2.909.600	3.084.200
14	13	2.909.600	3.084.200
15	14	3.001.200	3.181.300
16	15	3.001.200	3.181.300
17	16	3.095.700	3.281.500
18	17	3.095.700	3.281.500
19	18	3.193.200	3.384.900
20	19	3.193.200	3.384.900
21	20	3.293.800	3.491.500
22	21	3.293.800	3.491.500
23	22	3.397.500	3.601.400
24	23	3.397.500	3.601.400
25	24	3.504.500	3.714.900
26	25	3.504.500	3.714.900
27	26	3.614.900	3.831.900
28	27	3.614.900	3.831.900
29	28	3.728.800	3.952.600
30	29	3.728.800	3.952.600
31	30	3.846.200	4.077.000
32	31	3.846.200	4.077.000
33	32	3.967.300	4.205.400

GOLONGAN RUANG III/c

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.517.800	2.668.900
2	1	2.517.800	2.668.900
3	2	2.597.100	2.752.900
4	3	2.597.100	2.752.900
5	4	2.678.900	2.839.700
6	5	2.678.900	2.839.700
7	6	2.763.300	2.929.100
8	7	2.763.300	2.929.100
9	8	2.850.300	3.021.300
10	9	2.850.300	3.021.300
11	10	2.940.000	3.116.500
12	11	2.940.000	3.116.500
13	12	3.032.600	3.214.700
14	13	3.032.600	3.214.700
15	14	3.128.200	3.315.900
16	15	3.128.200	3.315.900
17	16	3.226.700	3.420.300
18	17	3.226.700	3.420.300
19	18	3.328.300	3.528.100
20	19	3.328.300	3.528.100
21	20	3.433.100	3.639.200
22	21	3.433.100	3.639.200
23	22	3.541.300	3.753.800
24	23	3.541.300	3.753.800
25	24	3.652.800	3.872.000
26	25	3.652.800	3.872.000
27	26	3.767.800	3.994.000
28	27	3.767.800	3.994.000
29	28	3.886.500	4.119.700
30	29	3.886.500	4.119.700
31	30	4.008.900	4.249.500
32	31	4.008.900	4.249.500
33	32	4.135.200	4.383.300

GOLONGAN RUANG III/d

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.624.300	2.781.800
2	1	2.624.300	2.781.800
3	2	2.706.900	2.869.400
4	3	2.706.900	2.869.400
5	4	2.792.200	2.959.800
6	5	2.792.200	2.959.800
7	6	2.880.100	3.053.000
8	7	2.880.100	3.053.000
9	8	2.970.800	3.149.100
10	9	2.970.800	3.149.100
11	10	3.064.400	3.248.300
12	11	3.064.400	3.248.300
13	12	3.160.900	3.350.600
14	13	3.160.900	3.350.600
15	14	3.260.500	3.456.200
16	15	3.260.500	3.456.200
17	16	3.363.200	3.565.000
18	17	3.363.200	3.565.000
19	18	3.469.100	3.677.300
20	19	3.469.100	3.677.300
21	20	3.578.400	3.793.100
22	21	3.578.400	3.793.100
23	22	3.691.100	3.912.600
24	23	3.691.100	3.912.600
25	24	3.807.300	4.035.800
26	25	3.807.300	4.035.800
27	26	3.927.200	4.162.900
28	27	3.927.200	4.162.900
29	28	4.050.900	4.294.000
30	29	4.050.900	4.294.000
31	30	4.178.500	4.429.300
32	31	4.178.500	4.429.300
33	32	4.310.100	4.568.800

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Perencanaan Perundang-undangan,  
  
Haryono Dwi Putranto

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN I-d  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 40 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
 NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30  
 TAHUN 2015

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015

GOLONGAN RUANG IV/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG IV/e

GOLONGAN RUANG IV/a

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.735.300	2.899.500
2	1	2.735.300	2.899.500
3	2	2.821.400	2.990.800
4	3	2.821.400	2.990.800
5	4	2.910.300	3.085.000
6	5	2.910.300	3.085.000
7	6	3.002.000	3.182.100
8	7	3.002.000	3.182.100
9	8	3.096.500	3.282.400
10	9	3.096.500	3.282.400
11	10	3.194.000	3.385.700
12	11	3.194.000	3.385.700
13	12	3.294.600	3.492.400
14	13	3.294.600	3.492.400
15	14	3.398.400	3.602.400
16	15	3.398.400	3.602.400
17	16	3.505.400	3.715.800
18	17	3.505.400	3.715.800
19	18	3.615.800	3.832.800
20	19	3.615.800	3.832.800
21	20	3.729.700	3.953.600
22	21	3.729.700	3.953.600
23	22	3.847.200	4.078.100
24	23	3.847.200	4.078.100
25	24	3.968.300	4.206.500
26	25	3.968.300	4.206.500
27	26	4.093.300	4.339.000
28	27	4.093.300	4.339.000
29	28	4.222.300	4.475.700
30	29	4.222.300	4.475.700
31	30	4.355.200	4.616.600
32	31	4.355.200	4.616.600
33	32	4.492.400	4.762.000

GOLONGAN RUANG IV/b

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.851.000	3.022.100
2	1	2.851.000	3.022.100
3	2	2.940.800	3.117.300
4	3	2.940.800	3.117.300
5	4	3.033.400	3.215.500
6	5	3.033.400	3.215.500
7	6	3.128.900	3.316.700
8	7	3.128.900	3.316.700
9	8	3.227.500	3.421.200
10	9	3.227.500	3.421.200
11	10	3.329.100	3.528.900
12	11	3.329.100	3.528.900
13	12	3.434.000	3.640.100
14	13	3.434.000	3.640.100
15	14	3.542.200	3.754.700
16	15	3.542.200	3.754.700
17	16	3.653.700	3.873.000
18	17	3.653.700	3.873.000
19	18	3.768.800	3.995.000
20	19	3.768.800	3.995.000
21	20	3.887.500	4.120.800
22	21	3.887.500	4.120.800
23	22	4.009.900	4.250.600
24	23	4.009.900	4.250.600
25	24	4.136.200	4.384.400
26	25	4.136.200	4.384.400
27	26	4.266.500	4.522.500
28	27	4.266.500	4.522.500
29	28	4.400.900	4.665.000
30	29	4.400.900	4.665.000
31	30	4.539.500	4.811.900
32	31	4.539.500	4.811.900
33	32	4.682.400	4.963.400



GOLONGAN RUANG IV/c


NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.971.600	3.149.900
2	1	2.971.600	3.149.900
3	2	3.065.200	3.249.100
4	3	3.065.200	3.249.100
5	4	3.161.700	3.351.500
6	5	3.161.700	3.351.500
7	6	3.261.300	3.457.000
8	7	3.261.300	3.457.000
9	8	3.364.000	3.565.900
10	9	3.364.000	3.565.900
11	10	3.470.000	3.678.200
12	11	3.470.000	3.678.200
13	12	3.579.300	3.794.100
14	13	3.579.300	3.794.100
15	14	3.692.000	3.913.600
16	15	3.692.000	3.913.600
17	16	3.808.300	4.036.800
18	17	3.808.300	4.036.800
19	18	3.928.200	4.164.000
20	19	3.928.200	4.164.000
21	20	4.051.900	4.295.100
22	21	4.051.900	4.295.100
23	22	4.179.500	4.430.400
24	23	4.179.500	4.430.400
25	24	4.311.200	4.569.900
26	25	4.311.200	4.569.900
27	26	4.447.000	4.713.800
28	27	4.447.000	4.713.800
29	28	4.587.000	4.862.300
30	29	4.587.000	4.862.300
31	30	4.731.500	5.015.400
32	31	4.731.500	5.015.400
33	32	4.880.500	5.173.400

GOLONGAN RUANG IV/d

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0	3.097.300	3.283.200
2	1	3.097.300	3.283.200
3	2	3.194.800	3.386.600
4	3	3.194.800	3.386.600
5	4	3.295.500	3.493.200
6	5	3.295.500	3.493.200
7	6	3.399.300	3.603.300
8	7	3.399.300	3.603.300
9	8	3.506.300	3.716.700
10	9	3.506.300	3.716.700
11	10	3.616.700	3.833.800
12	11	3.616.700	3.833.800
13	12	3.730.700	3.954.600
14	13	3.730.700	3.954.600
15	14	3.848.200	4.079.100
16	15	3.848.200	4.079.100
17	16	3.969.400	4.207.600
18	17	3.969.400	4.207.600
19	18	4.094.400	4.340.100
20	19	4.094.400	4.340.100
21	20	4.223.300	4.476.800
22	21	4.223.300	4.476.800
23	22	4.356.300	4.617.800
24	23	4.356.300	4.617.800
25	24	4.493.500	4.763.200
26	25	4.493.500	4.763.200
27	26	4.635.100	4.913.200
28	27	4.635.100	4.913.200
29	28	4.781.000	5.068.000
30	29	4.781.000	5.068.000
31	30	4.931.600	5.227.600
32	31	4.931.600	5.227.600
33	32	5.086.900	5.392.200

GOLONGAN RUANG IV/e

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0	3.228.300	3.422.100
2	1	3.228.300	3.422.100
3	2	3.330.000	3.529.800
4	3	3.330.000	3.529.800
5	4	3.434.900	3.641.000
6	5	3.434.900	3.641.000
7	6	3.543.000	3.755.700
8	7	3.543.000	3.755.700
9	8	3.654.600	3.874.000
10	9	3.654.600	3.874.000
11	10	3.769.700	3.996.000
12	11	3.769.700	3.996.000
13	12	3.888.500	4.121.800
14	13	3.888.500	4.121.800
15	14	4.010.900	4.251.600
16	15	4.010.900	4.251.600
17	16	4.137.300	4.385.600
18	17	4.137.300	4.385.600
19	18	4.267.600	4.523.700
20	19	4.267.600	4.523.700
21	20	4.402.000	4.666.100
22	21	4.402.000	4.666.100
23	22	4.540.600	4.813.100
24	23	4.540.600	4.813.100
25	24	4.683.600	4.964.700
26	25	4.683.600	4.964.700
27	26	4.831.100	5.121.100
28	27	4.831.100	5.121.100
29	28	4.983.300	5.282.300
30	29	4.983.300	5.282.300
31	30	5.140.200	5.448.700
32	31	5.140.200	5.448.700
33	32	5.302.100	5.620.300

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Perencanaan Perundang-undangan,  
  
Dwi Putranto

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
ttd.  
BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN I-e  
PERATURAN KEPALA BADANKEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 40 TAHUN 2015  
TENTANG  
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30  
TAHUN 2015

CONTOH:

KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS/CALON PNS

KEPUTUSAN ..... 1)

NOMOR ..... 2)

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., 1)

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, perlu menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);  
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134);  
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);  
6. Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil 4) sebagai berikut:

1	Nama		5)
2	NIP		6)
3	Tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir		7)
4	Pangkat, golongan ruang		8)
5	Masa kerja golongan	Tahun	bulan 9)
6	Gaji pokok lama	Rp.	10)
7	Gaji pokok baru	Rp.	11)
8	Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	Tahun	bulan 12)
9	Jabatan		13)
10	Unit kerja		14)
11	Keterangan		15)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... 16)

pada tanggal ..... 17)

....., 1)

..... 18)


NIP. ....19)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan ..... 20) di ..... 21);
2. Pembuat Daftar Gaji ..... 22); dan
3. .... 23)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-e

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
2	2)	Tulislah nomor keputusan penyesuaian gaji pokok.
3	3)	Tulislah jika ada keputusan pendelegasian wewenang untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
4	4)	Coret salah satu, PNS atau CPNS sesuai status kepegawaian yang bersangkutan.
5	5)	Tulislah nama PNS atau CPNS yang bersangkutan.
6	6)	Tulislah NIP PNS atau CPNS yang bersangkutan.
7	7)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir PNS atau CPNS yang bersangkutan sesuai keputusan pengangkatan pertama sebagai PNS atau CPNS.
8	8)	Tulislah pangkat, golongan ruang terakhir PNS atau CPNS yang bersangkutan.
9	9)	Tulislah dengan angka tahun, bulan masa kerja golongan PNS atau CPNS yang bersangkutan, pada tanggal 31 Desember 2014.
10	10)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok lama PNS atau CPNS yang bersangkutan.
11	11)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok baru PNS atau CPNS yang bersangkutan.
12	12)	Tulislah dengan angka tahun, bulan dengan cara menghitung selisih antara masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya dengan masa kerja yang dimiliki PNS atau CPNS yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2014.
13	13)	Tulislah nama jabatan PNS atau CPNS yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah unit kerja PNS atau CPNS yang bersangkutan.
15	15)	Tulislah hal-hal yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan keputusan penyesuaian gaji pokok. Misal, PNS atau CPNS yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin, cuti diluar tanggungan negara, dan sebagainya.
16	16)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
17	17)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
18	18)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
19	19)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
20	20)	Tulislah nama instansi PNS atau CPNS yang bersangkutan.
21	21)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), PEKAS, Biro/Bagian Keuangan instansi PNS atau CPNS yang bersangkutan.
22	22)	Tulislah nama instansi tempat PNS atau CPNS yang bersangkutan bekerja.
23	23)	Tulislah Pejabat lain yang dianggap perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,  
  
Haryomo Dwi Putranto

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
ttd.  
BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN I-f  
PERATURAN KEPALA BADANKEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 40 TAHUN 2015  
TENTANG  
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30  
TAHUN 2015

CONTOH :  
KEPUTUSAN PENDELEGASIAN WEWENANG  
UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS

KEPUTUSAN..... 1)  
NOMOR ..... 2)  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
....., 1)

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, perlu memberikan delegasi wewenang untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
- b. .... 3);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134);

5. .... 4);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan delegasi wewenang kepada ..... NIP ..... jabatan ..... 5) untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan ..... 6).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... 7)  
pada tanggal ..... 8)

....., 1)

..... 9)  
NIP. .... 10)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan ..... 11) di ..... 12); dan
2. .... 13).



PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-f

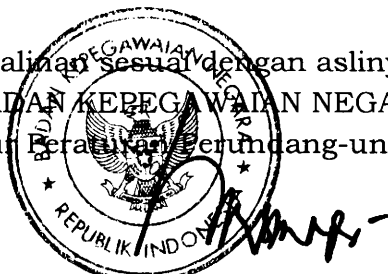
NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan pendelegasian wewenang.
2	2)	Tulislah nomor keputusan pendelegasian wewenang.
3	3)	Tulislah konsideran lain yang dianggap perlu.
4	4)	Tulislah dasar hukum peraturan perundang-undangan lain yang dianggap perlu.
5	5)	Tulislah nama, NIP, dan jabatan yang diberi delegasi wewenang.
6	6)	Tulislah instansi PNS yang disesuaikan gaji pokok.
7	7)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan pendelegasian wewenang.
8	8)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan pendelegasian wewenang.
9	9)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani keputusan pendelegasian wewenang.
10	10)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan pendelegasian wewenang.
11	11)	Tulislah nama instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
12	12)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), PEKAS, Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan.
13	13)	Tulislah Pejabat lain yang dianggap perlu.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan/Perundang-undangan,



Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN I-g  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 40 TAHUN 2015  
TENTANG  
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30  
TAHUN 2015

CONTOH:  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS  
YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERUPA  
PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH

KEPUTUSAN ..... 1)  
NOMOR ..... 2)  
TENTANG  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN  
BERUPA PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., 1)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... 3), Sdr. .... 4) NIP. .... 5), terhitung mulai tanggal ..... s/d tanggal ..... 6) telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
6. Keputusan ... Nomor ... tanggal ... 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1	Nama		4)
2	NIP		5)
3	Tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir		8)
4	Pangkat, golongan ruang		9)
5	Masa kerja golongan	Tahun	bulan 10)
6	Gaji pokok lama	Rp.	11)
7	Gaji pokok baru	Rp.	12)
8	Jabatan		13)
9	Unit kerja		14)

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., 15) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi sebagai berikut:

1	Pangkat, golongan ruang		16)
2	Masa kerja golongan	Tahun	bulan 17)
3	Gaji pokok lama	Rp.	18)
4	Gaji pokok baru	Rp.	19)
5	Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	Tahun	bulan 20)

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... 21)  
pada tanggal ..... 22)

....., 1)

..... (23)

NIP. .... (24)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan ..... 25) di ..... 26);
2. Pembuat Daftar Gaji ..... 27); dan
3. .... 28)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-g

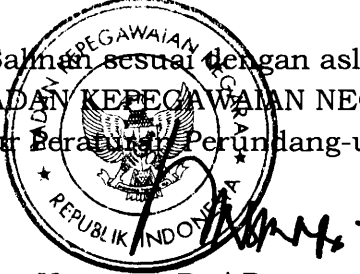
NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	1)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
2	2)	Tulislah nomor keputusan penyesuaian gaji pokok.
3	3)	Tulislah nama jabatan, nomor dan tanggal keputusan hukuman disiplin.
4	4)	Tulislah nama PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
5	5)	Tulislah NIP PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
6	6)	Tulislah tanggal mulai berlaku dan berakhirnya hukuman disiplin.
7	7)	Tulislah jika ada keputusan pendelegasian wewenang untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
8	8)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang bersangkutan sesuai keputusan pengangkatan pertama sebagai PNS.
9	9)	Tulislah pangkat, golongan ruang pada tanggal 31 Desember 2014.
10	10)	Tulislah dengan angka tahun dan bulan masa kerja golongan PNS yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2014.
11	11)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok lama sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan pada tanggal 31 Desember 2014.
12	12)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok baru sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan pada tanggal 31 Desember 2014.
13	13)	Tulislah nama jabatan PNS yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah nama unit kerja PNS yang bersangkutan.
15	15)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun dikembalikannya gaji pokok PNS yang bersangkutan setelah berakhirnya hukuman disiplin.
16	16)	Tulislah pangkat, golongan ruang PNS yang bersangkutan setelah dikembalikan pada pangkat semula, setelah selesai menjalani hukuman disiplin.
17	17)	Tulislah dengan angka tahun dan bulan masa kerja golongan yang baru PNS yang bersangkutan, setelah selesai menjalani hukuman disiplin.
18	18)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan setelah selesai menjalani hukuman disiplin.

19	19)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan setelah selesai menjalani hukuman disiplin.
20	20)	Tulislah dengan angka tahun dan bulan dengan cara menghitung selisih antara selisih masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya dengan jumlah masa kerja yang dimiliki PNS yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2014.
21	21)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
22	22)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
23	23)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
24	24)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
25	25)	Tulislah nama instansi PNS yang bersangkutan.
26	26)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), PEKAS, Biro/Bagian Keuangan instansi PNS yang bersangkutan.
27	27)	Tulislah nama instansi tempat PNS yang bersangkutan bekerja.
28	28)	Tulislah Pejabat lain yang dianggap perlu.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Perencanaan Perundang-undangan,  
  
Haryomo Dwi Putranto

LAMPIRAN II-a  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 40 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
 NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30  
 TAHUN 2015

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015

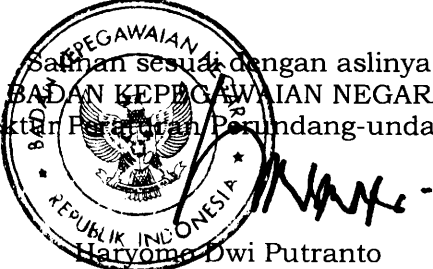
GOLONGAN RUANG I/a DAN GOLONGAN RUANG I/c

GOLONGAN RUANG I/a

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.121.920	1.189.200
2	1	1.121.920	1.189.200
3	2	1.157.200	1.226.720
4	3	1.157.200	1.226.720
5	4	1.193.680	1.265.360
6	5	1.193.680	1.265.360
7	6	1.231.280	1.305.200
8	7	1.231.280	1.305.200
9	8	1.270.080	1.346.320
10	9	1.270.080	1.346.320
11	10	1.310.080	1.388.720
12	11	1.310.080	1.388.720
13	12	1.351.360	1.432.400
14	13	1.351.360	1.432.400
15	14	1.393.920	1.477.520
16	15	1.393.920	1.477.520
17	16	1.437.760	1.524.080
18	17	1.437.760	1.524.080
19	18	1.483.040	1.572.080
20	19	1.483.040	1.572.080
21	20	1.529.760	1.621.600
22	21	1.529.760	1.621.600
23	22	1.577.920	1.672.640
24	23	1.577.920	1.672.640
25	24	1.627.680	1.725.360
26	25	1.627.680	1.725.360
27	26	1.678.880	1.779.680
28	27	1.678.880	1.779.680

GOLONGAN RUANG I/c

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.277.040	1.353.680
5	4	1.277.040	1.353.680
6	5	1.317.200	1.396.320
7	6	1.317.200	1.396.320
8	7	1.358.720	1.440.240
9	8	1.358.720	1.440.240
10	9	1.401.520	1.485.600
11	10	1.401.520	1.485.600
12	11	1.445.680	1.532.400
13	12	1.445.680	1.532.400
14	13	1.491.200	1.580.640
15	14	1.491.200	1.580.640
16	15	1.538.160	1.630.480
17	16	1.538.160	1.630.480
18	17	1.586.560	1.681.840
19	18	1.586.560	1.681.840
20	19	1.636.560	1.734.800
21	20	1.636.560	1.734.800
22	21	1.688.080	1.789.440
23	22	1.688.080	1.789.440
24	23	1.741.280	1.845.760
25	24	1.741.280	1.845.760
26	25	1.796.080	1.903.920
27	26	1.796.080	1.903.920
28	27	1.852.640	1.963.840

Sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Perencanaan/Pesundang-undangan,  
  
Haryono Dwi Putranto

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.  
BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN II-b  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 40 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
 NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30  
 TAHUN 2015

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015

GOLONGAN RUANG II/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG II/c

GOLONGAN RUANG II/a

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.453.520	1.540.800
2	1	1.476.480	1.565.040
3	2	1.476.480	1.565.040
4	3	1.522.960	1.614.320
5	4	1.522.960	1.614.320
6	5	1.570.880	1.665.200
7	6	1.570.880	1.665.200
8	7	1.620.400	1.717.600
9	8	1.620.400	1.717.600
10	9	1.671.440	1.771.760
11	10	1.671.440	1.771.760
12	11	1.724.080	1.827.520
13	12	1.724.080	1.827.520
14	13	1.778.400	1.885.120
15	14	1.778.400	1.885.120
16	15	1.834.400	1.944.480
17	16	1.834.400	1.944.480
18	17	1.892.160	2.005.680
19	18	1.892.160	2.005.680
20	19	1.951.760	2.068.880
21	20	1.951.760	2.068.880
22	21	2.013.200	2.134.000
23	22	2.013.200	2.134.000
24	23	2.076.640	2.201.280
25	24	2.076.640	2.201.280
26	25	2.142.000	2.270.560
27	26	2.142.000	2.270.560
28	27	2.209.520	2.342.080
29	28	2.209.520	2.342.080
30	29	2.279.040	2.415.840
31	30	2.279.040	2.415.840
32	31	2.350.880	2.491.920
33	32	2.350.880	2.491.920
34	33	2.424.880	2.570.400



GOLONGAN RUANG II/b

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.587.360	1.682.640
5	4	1.587.360	1.682.640
6	5	1.637.360	1.735.600
7	6	1.637.360	1.735.600
8	7	1.688.960	1.790.320
9	8	1.688.960	1.790.320
10	9	1.742.160	1.846.640
11	10	1.742.160	1.846.640
12	11	1.796.960	1.904.880
13	12	1.796.960	1.904.880
14	13	1.853.600	1.964.800
15	14	1.853.600	1.964.800
16	15	1.912.000	2.026.720
17	16	1.912.000	2.026.720
18	17	1.972.160	2.090.560
19	18	1.972.160	2.090.560
20	19	2.034.320	2.156.400
21	20	2.034.320	2.156.400
22	21	2.098.400	2.224.320
23	22	2.098.400	2.224.320
24	23	2.164.480	2.294.320
25	24	2.164.480	2.294.320
26	25	2.232.640	2.366.640
27	26	2.232.640	2.366.640
28	27	2.302.960	2.441.120
29	28	2.302.960	2.441.120
30	29	2.375.440	2.518.080
31	30	2.375.440	2.518.080
32	31	2.450.320	2.597.360
33	32	2.450.320	2.597.360
34	33	2.527.440	2.679.120

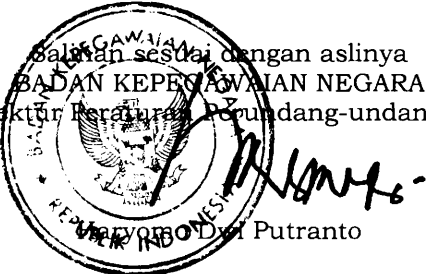
GOLONGAN RUANG II/c

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.654.480	1.753.840
5	4	1.654.480	1.753.840
6	5	1.706.640	1.809.040
7	6	1.706.640	1.809.040
8	7	1.760.400	1.866.000
9	8	1.760.400	1.866.000
10	9	1.815.840	1.924.800
11	10	1.815.840	1.924.800
12	11	1.873.040	1.985.440
13	12	1.873.040	1.985.440
14	13	1.932.000	2.047.920
15	14	1.932.000	2.047.920
16	15	1.992.880	2.112.480
17	16	1.992.880	2.112.480
18	17	2.055.600	2.178.960
19	18	2.055.600	2.178.960
20	19	2.120.320	2.247.600
21	20	2.120.320	2.247.600
22	21	2.187.120	2.318.400
23	22	2.187.120	2.318.400
24	23	2.256.000	2.391.440
25	24	2.256.000	2.391.440
26	25	2.327.040	2.466.720
27	26	2.327.040	2.466.720
28	27	2.400.320	2.544.400
29	28	2.400.320	2.544.400
30	29	2.475.920	2.624.560
31	30	2.475.920	2.624.560
32	31	2.553.920	2.707.200
33	32	2.553.920	2.707.200
34	33	2.634.400	2.792.480

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Berdasarkan dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,  
  
Dwi Putranto

LAMPIRAN II-c  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 40 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
 NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30  
 TAHUN 2015

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014  
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015

GOLONGAN RUANG III/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG III/c

GOLONGAN RUANG III/a

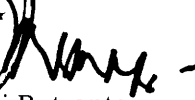
NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.854.080	1.965.360
2	1	1.854.080	1.965.360
3	2	1.912.480	2.027.200
4	3	1.912.480	2.027.200
5	4	1.972.720	2.091.040
6	5	1.972.720	2.091.040
7	6	2.034.800	2.156.960
8	7	2.034.800	2.156.960
9	8	2.098.880	2.224.880
10	9	2.098.880	2.224.880
11	10	2.165.040	2.294.960
12	11	2.165.040	2.294.960
13	12	2.233.200	2.367.200
14	13	2.233.200	2.367.200
15	14	2.303.520	2.441.760
16	15	2.303.520	2.441.760
17	16	2.376.080	2.518.640
18	17	2.376.080	2.518.640
19	18	2.450.880	2.598.000
20	19	2.450.880	2.598.000
21	20	2.528.080	2.679.840
22	21	2.528.080	2.679.840
23	22	2.607.760	2.764.240
24	23	2.607.760	2.764.240
25	24	2.689.840	2.851.280
26	25	2.689.840	2.851.280
27	26	2.774.560	2.941.120
28	27	2.774.560	2.941.120
29	28	2.861.920	3.033.680
30	29	2.861.920	3.033.680
31	30	2.952.080	3.129.280
32	31	2.952.080	3.129.280
33	32	3.045.040	3.227.840

GOLONGAN RUANG III/b

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.932.480	2.048.480
2	1	1.932.480	2.048.480
3	2	1.993.360	2.112.960
4	3	1.993.360	2.112.960
5	4	2.056.160	2.179.520
6	5	2.056.160	2.179.520
7	6	2.120.880	2.248.160
8	7	2.120.880	2.248.160
9	8	2.187.680	2.318.960
10	9	2.187.680	2.318.960
11	10	2.256.560	2.392.000
12	11	2.256.560	2.392.000
13	12	2.327.680	2.467.360
14	13	2.327.680	2.467.360
15	14	2.400.960	2.545.040
16	15	2.400.960	2.545.040
17	16	2.476.560	2.625.200
18	17	2.476.560	2.625.200
19	18	2.554.560	2.707.920
20	19	2.554.560	2.707.920
21	20	2.635.040	2.793.200
22	21	2.635.040	2.793.200
23	22	2.718.000	2.881.120
24	23	2.718.000	2.881.120
25	24	2.803.600	2.971.920
26	25	2.803.600	2.971.920
27	26	2.891.920	3.065.520
28	27	2.891.920	3.065.520
29	28	2.983.040	3.162.080
30	29	2.983.040	3.162.080
31	30	3.076.960	3.261.600
32	31	3.076.960	3.261.600
33	32	3.173.840	3.364.320

GOLONGAN RUANG III/c

NO.	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 34 TAHUN 2014 (Rp)	PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)
1	2	4	6
1	0	2.014.240	2.135.120
2	1	2.014.240	2.135.120
3	2	2.077.680	2.202.320
4	3	2.077.680	2.202.320
5	4	2.143.120	2.271.760
6	5	2.143.120	2.271.760
7	6	2.210.640	2.343.280
8	7	2.210.640	2.343.280
9	8	2.280.240	2.417.040
10	9	2.280.240	2.417.040
11	10	2.352.000	2.493.200
12	11	2.352.000	2.493.200
13	12	2.426.080	2.571.760
14	13	2.426.080	2.571.760
15	14	2.502.560	2.652.720
16	15	2.502.560	2.652.720
17	16	2.581.360	2.736.240
18	17	2.581.360	2.736.240
19	18	2.662.640	2.822.480
20	19	2.662.640	2.822.480
21	20	2.746.480	2.911.360
22	21	2.746.480	2.911.360
23	22	2.833.040	3.003.040
24	23	2.833.040	3.003.040
25	24	2.922.240	3.097.600
26	25	2.922.240	3.097.600
27	26	3.014.240	3.195.200
28	27	3.014.240	3.195.200
29	28	3.109.200	3.295.760
30	29	3.109.200	3.295.760
31	30	3.207.120	3.399.600
32	31	3.207.120	3.399.600
33	32	3.308.160	3.506.640

Sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Perencanaan Perundang-undangan,  
  
Haryono Ewi Putranto

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 40 TAHUN 2015  
TENTANG  
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30  
TAHUN 2015

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
  - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
  - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
  - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
  - e. Nomor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
  - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
  - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
  - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
  - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
  - j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
  - k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
  - l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
  - m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
  - n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
  - o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57); dan
  - p. Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108),  
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
yang Perundang-undangan,



Ammad Sapta Murti





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 40 TAHUN 2015  
TENTANG  
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30  
TAHUN 2015

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014

KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

(2) Pegawai ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
  
- (3) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## Pasal 2

- (1) Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknis penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2015

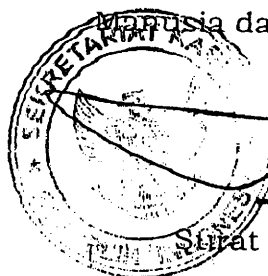

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 134

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,

  
  
Surat Indrijarso



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 70 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 10 JUNI 2015**

**DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014**  
**KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015**

Golongan I								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.402.400	1.486.500						
1								
2	1.446.500	1.533.400						
3			1.531.500	1.523.500	1.596.300	1.692.100	1.663.800	1.763.600
4	1.492.100	1.581.700						
5			1.579.700	1.574.500	1.646.500	1.745.400	1.716.200	1.819.200
6	1.539.100	1.631.500						
7			1.629.500	1.727.300	1.698.400	1.800.300	1.770.200	1.876.500
8	1.587.600	1.682.900						
9			1.680.800	1.781.200	1.751.900	1.857.000	1.826.000	1.935.000
10	1.637.600	1.735.900						
11			1.733.700	1.837.800	1.807.100	1.915.500	1.883.500	1.996.500
12	1.689.200	1.790.500						
13			1.788.300	1.895.700	1.864.000	1.975.800	1.942.800	2.059.000
14	1.742.400	1.846.900						
15			1.844.700	1.955.600	1.922.700	2.038.100	2.004.000	2.124.000
16	1.797.200	1.905.100						
17			1.902.700	2.016.300	1.983.200	2.102.300	2.067.100	2.191.000
18	1.853.800	1.965.100						
19			1.962.700	2.080.500	2.045.700	2.168.500	2.132.200	2.260.000
20	1.912.200	2.027.000						
21			2.024.500	2.146.000	2.110.100	2.236.800	2.199.400	2.331.000
22	1.972.400	2.090.800						
23			2.088.300	2.213.000	2.176.600	2.307.200	2.268.700	2.404.000





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

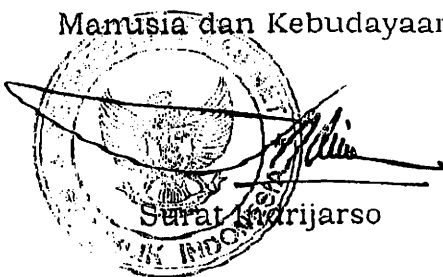
Golongan I								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
24	2.034.600	2.156.700						
25			2.154.000	2.283.300	2.245.100	2.379.900	2.340.100	2.480.500
26	2.098.600	2.224.600						
27			2.221.900	2.355.200	2.315.800	2.454.800	2.413.800	2.558.700

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 70 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 10 JUNI 2015**

**DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014**  
**KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015**

Golongan II								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.816.900	1.926.000						
1	1.845.600	1.956.300						
2								
3	1.903.700	2.017.900	1.984.200	2.103.300	2.068.100	2.192.300	2.155.600	2.285.000
4								
5	1.963.600	2.081.500	2.046.700	2.169.500	2.133.300	2.261.300	2.223.500	2.357.000
6								
7	2.025.500	2.147.000	2.111.200	2.237.900	2.200.500	2.332.500	2.293.500	2.431.200
8								
9	2.089.300	2.214.700	2.177.700	2.308.300	2.269.800	2.406.000	2.365.800	2.507.800
10								
11	2.155.100	2.284.400	2.246.200	2.381.100	2.341.300	2.481.800	2.440.300	2.586.700
12								
13	2.223.000	2.356.400	2.317.000	2.456.000	2.415.000	2.559.900	2.517.200	2.668.200
14								
15	2.293.000	2.430.600	2.390.000	2.533.400	2.491.100	2.640.600	2.596.400	2.752.300
16								
17	2.365.200	2.507.100	2.465.200	2.613.200	2.569.500	2.723.700	2.678.200	2.838.900
18								
19	2.439.700	2.586.100	2.542.900	2.695.500	2.650.400	2.809.500	2.762.600	2.928.300
20								
21	2.516.500	2.667.500	2.623.000	2.780.400	2.733.900	2.898.000	2.849.600	3.020.600
22								
23	2.595.800	2.751.600	2.705.600	2.867.900	2.820.000	2.989.300	2.939.300	3.115.700



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

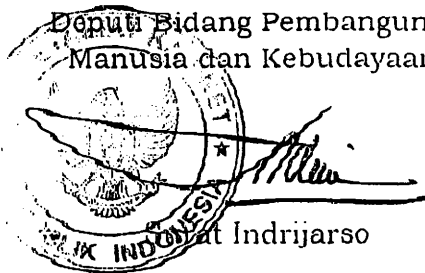
Golongan II								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
24								
25	2.677.500	2.838.200	2.790.800	2.958.300	2.908.800	3.083.400	3.031.900	3.213.800
26								
27	2.761.900	2.927.600	2.878.700	3.051.400	3.000.400	3.180.500	3.127.400	3.315.100
28								
29	2.848.800	3.019.800	2.969.300	3.147.600	3.094.900	3.280.700	3.225.900	3.419.500
30								
31	2.938.600	3.114.900	3.062.900	3.246.700	3.192.400	3.384.000	3.327.500	3.527.200
32								
33	3.031.100	3.213.000	3.159.300	3.348.900	3.293.000	3.490.600	3.432.300	3.638.200

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,



Indrijarso



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 70 TAHUN 2015  
TANGGAL : 10 JUNI 2015

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014  
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015

Golongan III								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	2.317.600	2.456.700	2.415.600	2.560.500	2.517.800	2.668.900	2.624.300	2.781.800
1								
2	2.390.600	2.534.000	2.491.700	2.641.200	2.597.100	2.752.900	2.706.900	2.869.400
3								
4	2.465.900	2.613.800	2.570.200	2.724.400	2.678.900	2.839.700	2.792.200	2.959.800
5								
6	2.543.500	2.696.200	2.651.100	2.810.200	2.763.300	2.929.100	2.880.100	3.053.000
7								
8	2.623.600	2.781.100	2.734.600	2.898.700	2.850.300	3.021.300	2.970.800	3.149.100
9								
10	2.706.300	2.868.700	2.820.700	2.990.000	2.940.000	3.116.500	3.064.400	3.248.500
11								
12	2.791.500	2.959.000	2.909.600	3.084.200	3.032.600	3.214.700	3.160.900	3.350.600
13								
14	2.879.400	3.052.200	3.001.200	3.181.500	3.128.200	3.315.900	3.260.500	3.456.200
15								
16	2.970.100	3.148.300	3.095.700	3.281.500	3.226.700	3.420.300	3.363.200	3.565.000
17								
18	3.063.600	3.247.500	3.193.200	3.384.300	3.328.300	3.528.100	3.469.100	3.677.300
19								
20	3.160.100	3.349.800	3.293.800	3.491.500	3.433.100	3.639.200	3.578.400	3.793.100
21								
22	3.259.700	3.455.300	3.397.500	3.601.400	3.541.300	3.753.800	3.691.100	3.912.600
23								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Golongan III								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
24	3.362.300	3.564.100	3.504.500	3.714.900	3.652.800	3.872.000	3.807.300	4.035.800
25								
26	3.468.200	3.676.400	3.614.900	3.831.900	3.767.800	3.994.000	3.927.200	4.162.900
27								
28	3.577.400	3.792.100	3.728.800	3.952.600	3.886.500	4.119.700	4.050.900	4.294.000
29								
30	3.690.100	3.911.600	3.846.200	4.077.000	4.008.900	4.249.500	4.178.500	4.429.300
31								
32	3.806.300	4.034.800	3.967.300	4.205.400	4.135.200	4.383.300	4.310.100	4.568.800

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 70 TAHUN 2015  
TANGGAL : 10 JUNI 2015

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014  
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015

Golongan IV										
MKG	a		b		c		d		e	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	2.735.300	2.899.500	2.851.000	3.022.100	2.971.600	3.149.900	3.097.300	3.283.200	3.228.300	3.422.100
1										
2	2.821.400	2.990.800	2.940.800	3.117.300	3.065.200	3.249.100	3.194.800	3.386.600	3.330.000	3.529.800
3										
4	2.910.300	3.085.000	3.033.400	3.215.500	3.161.700	3.351.500	3.295.500	3.493.200	3.434.900	3.641.000
5										
6	3.002.000	3.182.100	3.128.900	3.316.700	3.261.300	3.457.000	3.399.300	3.603.300	3.543.000	3.755.700
7										
8	3.096.500	3.282.400	3.227.500	3.421.200	3.364.000	3.565.900	3.506.300	3.716.700	3.654.600	3.874.000
9										
10	3.194.000	3.385.700	3.329.100	3.528.900	3.470.000	3.678.200	3.616.700	3.833.800	3.769.700	3.996.000
11										
12	3.294.600	3.492.400	3.434.000	3.640.100	3.579.300	3.794.100	3.730.700	3.954.600	3.888.500	4.121.800
13										
14	3.398.400	3.602.400	3.542.200	3.754.700	3.692.000	3.913.600	3.848.200	4.079.100	4.010.900	4.251.600
15										
16	3.505.400	3.715.800	3.653.700	3.873.000	3.808.300	4.036.800	3.969.400	4.207.600	4.137.300	4.385.600
17										
18	3.615.600	3.832.800	3.768.800	3.995.000	3.928.200	4.164.000	4.094.400	4.340.100	4.267.600	4.523.700
19										
20	3.729.700	3.953.600	3.887.500	4.120.800	4.051.900	4.295.100	4.223.300	4.476.800	4.402.000	4.666.100
21										
22	3.847.200	4.078.100	4.009.900	4.250.600	4.179.500	4.430.400	4.356.300	4.617.800	4.540.600	4.813.100
23										



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Golongannya IV										
MKG	a		b		c		d		e	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
24	3.968.300	4.206.500	4.136.200	4.384.400	4.311.200	4.569.900	4.493.500	4.763.200	4.683.600	4.964.700
25										
26	4.093.300	4.339.000	4.266.500	4.522.500	4.447.000	4.713.800	4.635.100	4.913.200	4.831.100	5.121.100
27										
28	4.222.300	4.475.700	4.400.900	4.665.000	4.587.000	4.862.300	4.781.000	5.068.000	4.983.300	5.282.300
29										
30	4.355.200	4.616.600	4.539.500	4.811.900	4.731.500	5.015.400	4.931.600	5.227.600	5.140.200	5.448.700
31										
32	4.492.400	4.762.000	4.682.400	4.963.400	4.880.500	5.173.400	5.086.900	5.392.200	5.302.100	5.620.300

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,

